

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK *HOME INDUSTRY* DI KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Destrinanda Wulandari, Retna Hanani, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The thematic village program is a program to address community problems in Kota Semarang. Thematic villages are implemented based on unique characteristics that each thematic village has. One of the thematic villages that needs to be researched is the home industry in Karanganyar Gunung Village, Candisari District, Semarang City. The aim of this research is to determine the implementation of the home industry thematic village program and to identify the driving factors and inhibiting factors in the implementation of the home industry thematic village program. Researcher used descriptive qualitative research methods using interview, observation and documentation techniques. The research results show that the home industry thematic village program process is being implemented based on the Mayor's Regulations regarding Guidelines for Implementing Thematic Villages. Starting with the stages of planning procedures, including financing to monitoring and evaluation (monev) which are carried out in accordance with established guidelines. However, its implementation has not yet optimal. This can be seen through the socialization and implementation process which still face several obstacles. Recommendations that can be given are that government needs to be more in-depth in providing information to MSME administrators and actors, the Chair of RW conducts more regular meetings, so that MSME actors increase their self-awareness of technology.

Keywords: *Program Implementation, Thematic Villages, MSMEs*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan maupun suatu badan yang telah memiliki tolak ukur selaku usaha mikro. UMKM sebagai sektor ekonomi kecil yang dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan, yang mana bagian integral dari ekonomi kerakyatan (Purba, 2019). Pada pengembangan UMKM di Indonesia, terdapat berbagai permasalahan yang

terjadi. Salah satu masalah yang dialami UMKM yaitu kesusahan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya, seperti modal, informasi, dan teknologi. Keadaan lainnya, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan tren pasar yang cepat dan persaingan yang semakin ketat dengan usaha yang lebih besar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

beberapa kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satu contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PNPM-UMKM).

Pembinaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan terlebih dalam hal pemberian kesempatan kepada masyarakat wirausaha dan penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan cara pendampingan serta pemantauan (*monitoring*). Di Kota Semarang, terdapat sebanyak 17.603 UMKM yang tersebar di seluruh kota. Pemerintah kota Semarang terus berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi UMKM, salah satunya melalui program Kampung Tematik. Berikut persebaran UMKM yang berada di Kota Semarang:

Gambar 1.1 Daftar UMKM di Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023

KECAMATAN	TOTAL PELAKU UMKM
Genuk	919
Semarang Timur	1062
Semarang Tengah	1312
Semarang Barat	1424
Tugu	432
Gayamsari	1109
Semarang Utara	1683
Ngaliyan	656
Pedurungan	2818
Mijen	572
Gunung Pati	586
Gajah Mungkur	618
Semarang Selatan	1013
Candisari	696
Banyumanik	998
Tembalang	1702

(Sumber: Website resmi Pemerintah Kota Semarang)

Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya berbagai program telah

diupayakan untuk mengembangkan potensi UMKM di Kota Semarang. Upaya dalam pengembangan kemampuan masyarakat dan membangun masyarakat mandiri dengan melahirkan lebih banyak wirausahawan baru asumsinya sederhana terlebih kemandirian ekonomis. Beberapa program tersebut di antaranya yaitu PNPM-UMKM, Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program GadePreneur. Dalam rangka mendorong UMKM agar terus berkembang di Kota Semarang, pemerintah menurunkan program Kampung Tematik.

Kampung Tematik adalah salah satu program dari Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan fokus pada beberapa aspek, seperti memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat dari kondisi yang tidak layak menjadi lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan keterampilan dan potensi ekonomi masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan wilayah. Program Kampung Tematik diatur secara resmi dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Panduan Pelaksanaan Kampung Tematik. Implementasi program ini melibatkan pembentukan kampung tematik baru serta perkembangan yang dilakukan terhadap kampung-kampung tematik yang sudah ada

sejak periode 2016-2018, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program. Kampung Tematik merupakan suatu wilayah yang berada dalam naungan kelurahan dengan memperlihatkan jati diri ataupun identitas dari potensi lokal yang diperlihatkan atas kesepakatan bersama masyarakat di suatu wilayah tersebut. Dalam kampung tematik terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keperluan dasar dengan memanfaatkan potensi lokal kampung tematik melalui potensi kampung, kearifan wilayah, serta prasarana UMKM produk pendukung kampung tematik.

Hal dasar pelaksanaan suatu wilayah menjadi Kampung Tematik dapat diamati dari 3 parameter kelayakan tema yaitu sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Tiga parameter itu merupakan dasar penjadian tema yang diusung pada kampung tematik. Tema yang diusung tersebut bermacam-macam seperti seni budaya, pariwisata, UMKM, potensi sumber daya, dan lainnya. Kebanyakan kampung tematik dibuat karena adanya pertimbangan produk unggulan yang mampu dijalankan sebagai keluaran unggulan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan taraf ekonomi.

Salah satu Kampung Tematik yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu Kampung Tematik *Home Industry* yang berada di RW

05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Diawali dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mengurus UMKM yaitu Kelompok Kerja III (Pokja III) dengan mengarahkan, mencatat, dan mendata mengenai usaha rumah tangga atau *home industry*. Salah satu tugas dari Pokja III yaitu mengembangkan kreativitas UMKM dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah dalam rangka penunjang pariwisata, dan pendorong terbentuknya lapangan pekerjaan dalam bidang jasa, sandang, pangan, serta perumahan dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

Kampung Tematik *Home Industry* ini diadakan setelah keberlangsungan Rumah Sehat tingkat kota antar kecamatan bulan April 2016, yang mana dituntut untuk memberikan inovasi atau unggulan. Dari RW 01 sampai 06 yang mempunyai banyak produsen industri yaitu pada RW 05. Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Kampung Tematik *Home Industry* sampai terealisasikan perencanaannya yang merupakan periode pertama bersama dengan kampung lainnya. Kampung tematik *home industry* ini didirikan melalui dasar banyaknya masyarakat yang tinggal berada di wilayah tersebut sebagai pelaksana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbagai kemampuan

diperlihatkan dengan kekhasan yang dimiliki setiap pelaku UMKM, yang mana perlu dikembangkan agar menjadi suatu potensi optimal dalam pengembangan program Kampung Tematik. Kampung Tematik *Home Industry* dikenal dengan berbagai produksi usaha, yaitu :

Gambar 1.2 Data UMKM Makanan Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung

NO	NAMA USAHA (MAKANAN)	PEMILIK
1.	Aneka Kue Kering	Ibu Arista
2.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Saparini
3.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Jumiaty
4.	Aneka <i>Snack</i>	Ibu Rini
5.	Ayam Geprek	Ibu Lilis
6.	Bandeng Populer	Ibu Arista
7.	Bandeng Thole	Bp. Tole
8.	Bawang Goreng	Ibu Untung
9.	Donat	Sumarni
10.	Hazel Chiffon	Bp. Arif Nurrahman
11.	Katering	Ibu Wiwik
12.	Katering	Ibu Sarni
13.	Krupuk Berkah	Ibu Ngarni
14.	Lumpia Jamur	Bp. Yusuf
15.	Lumpia Rebung	Bp. Amar
16.	Mie Ayam	Bp. Sumidi
17.	Nasi Bungkus	Ibu Susiyati
18.	Nasi Bungkus	Bp. Sobari
19.	Nasi Goreng Bu Nuk	Ibu Sukarnowati
20.	Nasi Goreng Kalimas	Bp. Arif Nurrahman
21.	Opak Solo	Ibu Saodah
22.	Pevek Berkah	Ibu Nurgiasih
23.	Proll Tape	Ibu Budi Lestari
24.	Sambal Abon Jambal	Ibu Nining
25.	Sate Bakso	Ibu Ariwahyuni
26.	Sate Donat	Ibu Safa
27.	Soto	Bp. Yusuf
28.	Susu Segar	Bp. Sartono
29.	Tahu Bakso 2W	Ibu Tri Wulandari
30.	Tahu Bakso Liliik	Bp. Wahyu Yulianto
31.	Telur Asin	Bp. Yusuf

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2023)

Gambar 1.3 Data UMKM Barang Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung

NO	NAMA USAHA (BARANG)	PEMILIK
1.	Asbag Rajut	Ibu Tri Astuti
2.	BL Kraft Rajut	Ibu Budi Lestrari
3.	Bonsai Bunga Plastik	Bp. Untung
4.	Kerajinan Limbah	Bp. Dul Rochim
5.	Oemah Dekor	Bp. Nendro
6.	Perabot RT	Ibu Sri Wahyuni
7.	Pot Tanaman	Bp. Margono
8.	Sulam Pita	Ibu Edi
9.	Tas Anyam	Bp. Yusuf
10.	Termak Cacing	Ibu Rahayu
11.	Warung Pojok Biru	Ibu Harni

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2023)

Pada tahun 2023, terdapat jumlah UMKM yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari sebanyak 42 UMKM dengan berbagai jenis

olahan yang di jual mulai dari makanan hingga barang jadi. Hal ini menarik perhatian masyarakat Kota Semarang untuk mengunjungi kampung tematik *home industry* tersebut karena menjual berbagai kreasi produk sehingga pengembangan program ini terus berjalan. Tetapi di balik perkembangan usaha masyarakat selaku UMKM melalui kampung tematik *home industry* tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai implementasi pada Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari.

Terdapat beberapa kelemahan pada aspek sumber daya dari pelaku UMKM yang memegang peranan terpenting. Hal ini disebabkan karena pemilik usaha atau yang menciptakan produk mengalami insiden seperti kecelakaan, sakit, hingga meninggal dunia, sehingga sumber daya yang tersedia menjadi berkurang. Peristiwa ini membuat omset penjualan menjadi menurun atau tenggelam. Terdapat pula beberapa pelaku UMKM yang masih merintis masih belum mempunyai izin usaha yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan alasan tidak hafal nomor telepon, email, hingga tidak ada rekening serta tidak memiliki NPWP.

Pada sisi pemerintah atau struktur birokrasi yang menangani permasalahan

Kampung Tematik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Dinas ini merupakan pihak yang memfasilitasi serta mengawasi masyarakat khususnya UMKM di kampung tematik. Bappeda melakukan pembinaan kepada UMKM dengan memberi dana serta pemantauan. Akan tetapi, lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Bappeda membuat pelaku UMKM pada pengembangan produk tidak dapat optimal. Pelaku UMKM merasa kurang adanya fasilitator pemerintah tersebut dalam membantu mengembangkan usaha dari para pelaku UMKM agar kualitas produk-produk yang telah dibuat dapat laku di pasar Kota Semarang maupun wilayah di Jawa Tengah hingga skala nasional. Hal tersebut membuat pemasukan yang diterima pelaku industri mengalami stagnan atau tidak adanya peningkatan.

Hal lain pun terlihat dari banyaknya UMKM yang kurang merasa terbantu karena Bappeda masih kurang memberikan fasilitas pelatihan yang dapat disinkronisasikan dengan perangkat lain yang terdapat di Kecamatan Candisari. Hal ini diakibatkan karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi tenaga kerja kepada para pelaku UMKM. Untuk itu perlu adanya pemasaran yang lebih luas dari sebelumnya serta pemberian ruang pemerintah kepada seluruh pelaku usaha yang berada di Kampung Tematik seluas-

luasnya pada keperluan yang dibutuhkan agar nantinya dapat disinergikan bersama dengan seluruh pihak yang berkaitan pada implementasi kampung tematik *home industry*.

Bappeda pun harus patut menyinergikan anggaran agar dimanfaatkan masyarakat sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Diketahui bahwa terdapat sokongan dana sebesar Rp 200.000.000,- yang hanya diluncurkan sekali digunakan pada pembuatan gapura dan perbaikan paving jalan sedangkan pada *maintenance* fasilitas tersebut menggunakan swadaya UMKM, serta kampung tematik *home industry* tidak mempunyai kas kelompok.

Salah satu keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan komunikasi. Aspek komunikasi yang terjadi antara ketua RW 05 dengan UMKM terjalin dengan kurang baik. Hal ini mengakibatkan saran ataupun masukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada dukungan potensi dan mengatasi permasalahan yang muncul di kampung tematik *home industry* kurang berjalan secara efektif dan efisien. Komunikasi yang dilakukan seharusnya dapat mencakup seluruh langkah sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi *miss communications* dari pihak ketua RW maupun UMKM.

Pengimplementasian aspek disposisi yang efektif dan efisien terjadi ketika pihak pembuat keputusan mengerti apa yang dibuat. Pedoman akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi yang terjadi dilakukan secara optimal dimana ketetapan dan regulasi dari pelaksanaan kerap dikomunikasikan dengan bagian personalia yang tepat (Handityasa & Purnaweni, 2020). Menurut hubungan yang dilakukan oleh warga RW 05, pelaku UMKM belum sepenuhnya mengetahui mengenai pedoman dalam penerapan dan perkembangan kampung tematik *home industry*. Ketua RW pun masih minim dalam melakukan adanya pertemuan dan mendiskusikan bersama melalui saran-saran dari UMKM. Pelaku UMKM lebih membutuhkan adanya pendampingan hingga pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sehingga dalam pelaksanaan pembuatan hasil produksi mereka dapat membuahkan hasil yang optimal terhadap penjualan ke pihak luar kampung tematik.

Dalam memahami secara baik faktor pendukung dan penghambat di kampung tematik *home industry*, diperlukannya analisis yang mendalam menggunakan metode fishbone. Faktor pendukung dan penghambat ini memiliki akar penyebab dan saling berkaitan, seperti halnya tulang ikan yang memiliki cabang-cabang yang terhubung. Konteks kampung

tematik *home industry*, faktor pendukung dan penghambat tidak hanya terbatas pada aspek kebijakan pemerintah dan infrastruktur, tetapi mencakup pula faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan metode fishbone, penulis dapat mengetahui tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat dikualifikasikan sebagai faktor pendukung dan mana faktor penghambat yang mana saling mempengaruhi serta strategi dapat dirancang untuk memaksimalkan faktor pendukung dan mengatasi hambatan yang muncul. Dengan demikian, metode fishbone memberikan kerangka kerja untuk menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kampung tematik *home industry*.

Pada hal pengimplementasian, tidak hanya proses untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan UMKM yang diperhatikan. Kerja sama serta partisipasi UMKM pun adalah komponen penting dalam implementasi kebijakan ataupun program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah pun menjadi aspek penting oleh pelaku UMKM karena merupakan penguatan dari kemampuan mempertahankan daya saing pasar. Penelitian ini menggunakan regulasi Peraturan Walikota yang berlaku mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik yang akan dijadikan landasan peneliti dalam menganalisis implementasi program

home industry dan menggunakan teori Edward III serta fishbone sebagai metode mengidentifikasi atau mengelompokkan faktor pendukung dan penghambat di kampung tematik *home industry*. Dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menganalisis penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi program Kampung Tematik *Home Industry* di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Implementasi Program

Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* Kota Semarang berpacu pada regulasi Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang Bab IV hingga VII Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* sebagai berikut:

- a) Tata Cara Perencanaan Program Kampung Tematik *Home Industry*
- b) Sosialisasi Program Kampung Tematik *Home Industry*
- c) Pelaksanaan Program Kampung Tematik *Home Industry*
- d) Monitoring dan Evaluasi Program Kampung Tematik *Home Industry*

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program

Teori faktor-faktor implementasi Edward III membantu untuk memahami kompleksitas implementasi program dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan keberjalanannya. Teori ini mencakup empat indikator yang diperlukan sebagai dasar mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi program, sebagai berikut:

- a) Komunikasi (*Communication*)
- b) Sumber Daya (*Resources*)
- c) Disposisi (*Disposition*)
- d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Faktor yang telah dikelompokkan akan dianalisis sebab akibat dengan bantuan metode fishbone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pemaparan secara deskriptif untuk menjelaskan implementasi program kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang. Sumber data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yakni data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa jurnal dan dokumen regulasi.

Pelatihan dan Pengembangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry*

a) Tata Cara Perencanaan

Diketahui bahwa pada awalnya Bappeda Kota Semarang melakukan perencanaan pembentukan Kampung Tematik melalui beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pemetaan potensi dan permasalahan, penentuan tema, penentuan dan penyusunan proposal Kampung Tematik, lalu verifikasi proposal Kampung Tematik. Dalam konteks ini, kampung tematik *home industry* merupakan program atau inisiatif yang bertujuan untuk

mengembangkan kampung tersebut dengan fokus tertentu yang mana menggambarkan ciri khas *home industry* yaitu industri rumahan yang dijalankan oleh para UMKM.

Alur pelaksanaan pada bagian kesatu yaitu, Bappeda Kota Semarang melihat potensi yang ada dalam kampung tematik *home industry*. Lalu pengurus dengan pelaku UMKM disana mendiskusikan tema yang akan diangkat ke dalam program. Selanjutnya mereka membuat proposal yang akan diajukan ke kecamatan dan kelurahan. Dari kecamatan, akan diberikan kepada Bappeda Kota Semarang selaku pihak yang memberikan persetujuan pada suatu kampung tematik.

Bagian kedua, Bappeda Kota Semarang akan melakukan pemetaan potensi dan permasalahan dari segi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur terhadap wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Tematik. Pada bagian ketiga, penentuan tema kampung tematik dilaksanakan oleh kelurahan dengan Bappeda Kota Semarang pada bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya (Pemsosbud) yang mana mengikutsertakan Ketua RW serta Ibu PKK yang terdapat dalam RW 05 Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Setelah pengumpulan proposal, langkah berikutnya adalah melakukan paparan mengenai isi proposal yang telah

diterima tersebut. Paparan ini bertujuan untuk menguraikan apa yang diusulkan dalam proposal tersebut. Seperti yang ada dalam Perwal Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 15 bahwa proposal perencanaan kampung tematik harus berisikan latar belakang, hasil pemetaan potensi dan permasalahan, rencana tindak lanjut, tujuan yang akan dicapai, gambaran perencanaan dan kondisi saat ini, rencana anggaran dan pembiayaan, serta berita acara dari rembuan masyarakat wilayah tersebut. Dengan demikian, paparan ini memungkinkan Bappeda Kota Semarang memahami dengan jelas gagasan yang diajukan oleh Ketua RW, Ibu PKK, dan masyarakat kawasan.

Sesudah paparan dilakukan, supervisi akan langsung ke lapangan, dimana tim pengawas melakukan peninjauan lebih mendalam dengan kondisi lapangan. Tujuan dari supervisi ini yaitu untuk memverifikasi apakah yang diusulkan dalam proposal telah sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa rencana yang diajukan dalam proposal dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di kawasan tematik tersebut.

b) Sosialisasi

Sosialisasi Program Kampung Tematik *Home Industry* merupakan upaya untuk menginformasikan dan melibatkan

pelaku UMKM dalam konsep dan manfaat program tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini, tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan program kampung tematik kepada pelaku UMKM yang berpotensi serta untuk menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana program tersebut dapat memberikan peluang dan dampak yang baik bagi pengembangan industri rumahan di kawasan tersebut.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu pada saat penetapan kampung tematik *home industry*. Selanjutnya, Bappeda Kota Semarang paling tidak melakukan sosialisasi sebanyak satu kali dalam setahun yang dilakukan bersama pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait. Pihak pengurus mengetahui informasi terkait program kampung tematik hanya dari sosialisasi yang diberikan oleh Bappeda Kota Semarang. Pemerintah hanya mengandalkan sosialisasi tanpa melakukan pendekatan atau penegasan pedoman program yang mana dapat mengakibatkan beberapa dampak yang perlu diperhatikan.

Tanpa adanya pemahaman pedoman, UMKM menjadi kurang terarah. Selain itu, tanpa adanya penegasan pedoman, penyalahgunaan atau penafsiran yang salah terhadap tujuan program juga dapat terjadi, mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan oleh *home industry*. Tidak adanya informasi yang diberikan selain sosialisasi dan selebihnya

melalui kegiatan yang dihadiri sendiri oleh pengurus dalam sosialisasi se-kota.

c) Pelaksanaan

Setiap kampung tematik diberikan dana sebanyak Rp 200.000.000,- termasuk *home industry*. Ketika dana sudah terpakai untuk pembangunan sarana prasarana baik fisik dan non-fisik, pengurus dan pelaku usaha harus bertahan dengan swadaya mereka sendiri. Pengurus *home industry* dituntut aktif dalam menjalankan program. Bappeda memfasilitasi ketika kampung ini terbentuk dan setelahnya bertugas untuk mengawasi. Pembangunan dari anggaran yang telah ditetapkan merupakan fasilitas atau sarana prasarana yang dibangun sebagai salah satu penunjang pencapaian program kampung tematik *home industry*, berupa pavingisasi jalan, gapura, mural, dan lainnya.

Selain sarana prasarana yang dibangun dalam *home industry*, dibutuhkan pula fasilitas yang tersedia dalam pemerintah dalam menunjang kinerja yang lebih optimal. Terdapat ruang kerja yang memadai serta akses teknologi yang cukup untuk berkoneksi dengan pemangku atau pihak lain yang terlibat dalam program.

Dalam keberjalan program diperlukannya ciri khas atau karakteristik yang melekat pada setiap pelaku UMKM. Dengan mempertahankan identitasnya yang khas, usaha yang dibangun oleh para pelaku UMKM tersebut dapat membangun

loyalitas pelanggan dan mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Dalam merebaknya bisnis saat ini, kekhasan menjadi hal yang kuat dipertahankan. Terlihat dari setiap UMKM memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing menjadikan karakteristik tersebut faktor pendorong yang baik dalam perkembangan usaha mereka.

Pengaruhnya sikap pengurus dalam keberjalanan program kampung tematik *home industry* semakin terasa. Melalui komitmen yang kuat untuk mempertahankan ciri khas produk, pengurus dapat memastikan bahwa setiap usaha yang ada di dalam program tersebut dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan ekonomi pelaku UMKM.

Regulasi dalam memberikan izin usaha kepada UMKM *home industry* merupakan hal yang penting dilakukan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Regulasi yang ditetapkan harus mempermudah pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan persyaratan atau prosedur yang berlaku. Hal ini menunjang iklim usaha agar lebih stabil dan teratur, serta mengurangi risiko ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha. Terdapat prosedur untuk mengajukan izin usaha tidak sulit. Pada konteks tersebut, pihak yang membantu UMKM mengajukan izin usaha dan yang

memberikan izin yaitu Dinas Koperasi. UMKM akan dibantu oleh Bappeda dalam pengajuan izin usaha.

Pada pelaksanaan program, dibutuhkan jangkauan (*reach out*) antara pemerintah dengan pengurus UMKM agar dapat terkendali dan berjalan secara lancar. Dilakukannya beberapa kali dalam setahun dari tim Bappeda Kota Semarang yang mensupervisikan kampung tematik *home industry* secara langsung. Pegawai Bappeda Kota Semarang siap dan sigap untuk membalas dan merespon ketika pengurus program membutuhkan sesuatu. Mereka turun ke lapangan langsung beberapa kali dalam setahun. Berdasarkan pernyataan dari kedua informan pegawai Bappeda Kota Semarang tersebut, kurangnya *reach out* yang dilakukan secara langsung kepada para pengurus UMKM kampung tematik *home industry*. Hal ini dapat membuat terhambatnya kepengurusan UMKM ketika membutuhkan sesuatu secara langsung atau *urgent* sehingga menjadi merasa kurang diperhatikan dan pemerintah tidak menjadikan kebutuhan pengurus merupakan *concern* yang utama dalam program kampung tematik *home industry*.

d) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap keempat dari implementasi program kampung tematik *home industry* pada penelitian ini. Monitoring dan evaluasi

merupakan aspek penting dalam implementasi program kampung tematik *home industry*. Monitoring adalah proses pemantauan yang berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut. Sementara itu, evaluasi merupakan proses analisis terhadap efektivitas program dengan mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai dan apakah sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal. Dengan menggabungkan monitoring dan evaluasi secara sistematis, implementasi program kampung tematik *home industry* dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Diperlukannya pemantauan kemajuan secara berkala, tim supervisi membutuhkan monitoring dan evaluasi sebagai penyesuaian untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Dengan dilakukannya monev, dapat memantau kemajuan dan pencapaian program kampung tematik *home industry*. Monev ini sejalan dengan yang telah tercantum dalam Perwal Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Bab VII yaitu Monitoring dan Evaluasi Pasal 27-29. Monev tersebut berarti sudah diimplementasikan oleh pegawai Bappeda Kota Semarang. Adanya monev ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang timbul selama

pelaksanaan program dan mengambil tindakan korektif dengan tepat. Secara keseluruhan, monev yang dilakukan membantu memastikan bahwa program berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat baik bagi pelaku UMKM. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan yang berada di dalam program kampung tematik *home industry*. Dapat dipastikan bahwa pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan Perwal yang berlaku. Hal ini dilihat melalui evaluasi yang dilakukan bahwa tugas yang dilakukan sesuai dengan Perwal yang ditetapkan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendorong dan penghambat dari Implementasi Program Kampung Tematik *Home Industry* Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Faktor Pendukung:

- Pembagian tugas dan struktur kepengurusan UMKM telah merata
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu pengurus dan pelaku UMKM dalam menjalankan

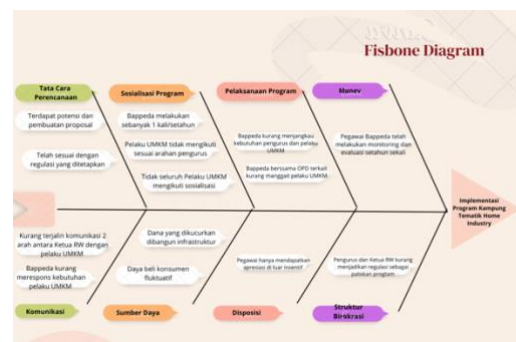
program *home industry*

- Fasilitas dan pendapatan yang mendukung kinerja pegawai
- Latar belakang UMKM
- Mempunyai karakteristik dan sikap inovatif terhadap produk yang dibuat oleh UMKM

Faktor Penghambat:

Gambar 2.1

Fishbone Diagram



(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, implementasi yang terdapat dalam program *home industry* sudah berjalan dengan baik, namun belum berada di titik optimal, dikarenakan terdapat beberapa kendala serta penghambat dari keberjalanan program. Hal tersebut ditandai dengan sosialisasi dan dalam proses pelaksanaan terdapat beberapa hal yang belum optimal, seperti Bappeda kurang menjangkau (*reach out*) kebutuhan pengurus kampung tematik dan pelaku

UMKM.

2. Faktor yang mendukung implementasi program kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang, antara lain meningkatnya kualitas SDM yaitu pengurus dan pelaku UMKM serta fasilitas pegawai Bappeda yang memadai. Selain itu, peneliti juga menemukan faktor yang menghambat, seperti kurangnya kesadaran diri pengurus terhadap program dan kurang terjalin komunikasi dua arah antara Ketua RW 05 dengan pelaku UMKM.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait implementasi program kampung tematik *home industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran, antara lain:

1. Bappeda harus lebih aktif dalam mendengarkan masukan dan kebutuhan dari para pelaku UMKM, sehingga kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat lebih sesuai dengan realitas lapangan.
2. Ketua RW 05 perlu lebih menginisiasi pertemuan melalui musrenbag dengan pelaku UMKM. Hal ini menjadi aspek positif agar Ketua RW 05 bonding

terhadap para UMKM. Komunikasi dengan pemerintah pun perlu diperkuat agar mempermudah memenuhi kebutuhan pelaku UMKM.

3. Pelaku UMKM harus meningkatkan kesadaran diri dalam hal pemanfaatan teknologi digital. Perlu dibangun motivasi internal yang kuat di kalangan pelaku UMKM *home industry* untuk mempelajari dan menerapkan teknologi dalam usaha mereka, seperti penyediaan seperti pelatihan gratis oleh kerja sama antara Bappeda dengan dinas terkait.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segenap civitas akademik Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Ibu Retna Hanani, S.Sos., MPP. dan Bapak Amni Zarkasyi Rahman, S.AP., M.Si., selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dewi Rostyaningsih, M.Si, selaku dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. ISBN:978-602-289-218-2
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press. ISBN: 978-979-1340-96-0
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Tachjan, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Jurnal

- Ahmad Surury Mufid, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Kampung Tematik Di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Ashar, R. F., & Purnaweni, H. (2019). Thematic Kampung Program Implementation in Kampung Jajanan Tradisional and Kampung Jahe Semarang City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 370-386.
- Astrika, L. (2018). Analisis Implementasi Program Kampung Tematik dalam Menanggulangi Kemiskinan Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Home Industry, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 31-40.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). Communication of Public Policy in Implementing Kampung Tematik Program in Rejomulyo Sub-District of Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 190-204.
- Hartono, I. W., Farhan, W., Hardiyanti, I. F. E., Dwi, P., & Yoga, N. A. (2020). Implementasi Konsep Kampung Tematik sebagai Solusi Permukiman Kumuh di Kauman Jember. *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), 31-45.
- Herawati, N. R. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG BATIK KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 356-371.
- Jauhari, A. F., & Astuti, P. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 291-300.
- Karsidi, R., Kartono, D. T., & Herdaningrum, D. (2020). THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THEMATIC VILLAGE COMMUNITY "KAMPUNG MANGOET" IN BANDARHARJO, NORTH SEMARANG. *International Journal of Education and Science Research*, 3(4), 102-111.
- Sarwono, M. I. N. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kampung Batik). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 491-502.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Tamara, A. P., & Rahdriawan, M. (2017). *Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- TRIMARLINAWATI, E. J. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS:*

KAMPUNG PELANGI) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Ulanuari, V., & Agustino, L. (2021). Implementation of The Thematic Village Program In The Empowerment of Small and Medium Enterprises (SMES) In Neglasari District Of Tangerang City. *International Journal of Social Sciences Review*, 2(1), 44-56.

Website

Keccandisarsemarangkota. (2024). *Kampung Home Industry*. Keccandisarsemarangkota.

<https://keccandisari.semarangkota.go.id/kampung-home-industri>

Databoks. (2023, Februari 02). Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-%20sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>

Ekongoid. (2021, Mei 05). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Ekongoid.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/%20umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-%20perekonomian-indonesia>

Karanganyargunungsemarangkota. (2024). *Geografis dan Penduduk*. Karanganyargunungsemarangkota.

<https://mail.karanganyargunung.semarangkota.go.id/en/geografisdanpenduduk>

Moovitapp. (2024) *Transportasi Umum Jangli Semarang*. Moovitapp.

https://moovitapp.com/index/id/Transportasi-Umum-Jangli-Semarang-stop_33433119-4425

Dokumen

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik

Disertasi

Ahmad Surury Mufid, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Kampung Tematik Di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta).

ATIKAPUTRI, K., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANG HEBAT (STUDI KASUS DI KAMPUNG BATIK, REJOMULYO SEMARANG)/83/ADM.*

PUBLIK/2021 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).